

Nasionalisme dan Internasionalisme¹

Oleh Yu Un Oppusunggu²

Atas undangan GMNI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia saya diminta untuk berbicara kepada saudara-saudara tentang nasionalisme. Bagi saya, yang bukan seorang aktivis ataupun simpatisan GMNI, adalah suatu kesempatan yang menarik untuk hadir di hadapan saudara-saudara yang terpelajar dan bicara tentang nasionalisme.

Bicara tentang Nasionalisme baiknya dimulai dengan memahami tentang arti kata itu sendiri. “Nasionalisme” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; politik untuk membela pemerintahan sendiri; sifat kenasionalan; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.³ Bahasa Indonesia menerjemahkan kata tersebut dari “*Nationalism*” (Inggris) yang memiliki pengertian:

1. *(a) devotion to one's nation; patriotism; (b) excessive, narrow jingoist patriotism; chauvinism;*
2. *the doctrine that national interests, security, etc are more important than international considerations; opposed to internationalism;*
3. *national quality or character; nationality;*
4. *a national idiom, trait or custom;*
5. *the desire for or advocacy of national independence;*
6. *the policy of nationalizing all industry;*
7. *in Great Britain, the principles advocated by the Nationalists [an advocator of home rule for Ireland].⁴*

Akar dari kata ini adalah “*nation*” yang berarti “keturunan, jenis, asal”. Kata ini sendiri memiliki akar dari kata “*nāscī*” (Latin) yang berarti “dilahirkan”, yang kemudian membentuk kata benda “*natiō*”, yang secara harafiah berarti “yang telah dilahirkan”. Dengan cepat kemudian kata tersebut memiliki pengertian dalam konsep ras atau etnis, dan kemudian “ras manusia, bangsa”. Kata ini masuk ke dalam kosa kata bahasa Inggris dengan pengertian “kesamaan atau satu nenek moyang”. Pada akhirnya pengertian yang melekat terhadap kata ini adalah pengertian konsep politik dari suatu unit organisasi teritorial.⁵

Jika kita kaitkan pengertian tentang Nasionalisme di atas dengan Asas-asas Perjuangan GMNI – Pancasila, UUD 1945, Marhaenisme dan Pancalogi GMNI – maka jelas sebagai suatu

¹ Disampaikan dalam acara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (GMNI KOM-FHUI), di Depok, 24 Juli 2008.

² Penulis adalah anggota tim pengajar kelompok perkuliahan Hukum Antar Tata Hukum dan anggota Bidang Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

⁴ *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, Second Edition.

⁵ John Ayto. *Dictionary of Word Origins*. New York: Arcade Publishing, 1993.

organisasi atau gerakan mahasiswa yang mengusung kata *Nasional* dalam namanya, GMNI merupakan suatu gerakan nasionalisme, dan setiap anggota GMNI adalah seorang nasionalis!

Butir kedua dari Pancalogi GMNI, *Revolusi*, dijelaskan sebagai “perjuangan setiap anggota GMNI harus berorientasi pada perombakan susunan masyarakat secara revolusioner.” Revolusi ini, demikian diteruskan, bukan berarti pertumpahan darah, tetapi dalam pengertian *pemikiran*. Dalam kesempatan ini saya akan mengkaitkan nasionalisme dengan revolusi pemikiran yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan generasi ini. Setiap generasi punya tantangannya sendiri. Dan tantangan tersebut menuntut tiap generasi untuk bersikap dan bertindak dengan cermat untuk kelangsungan eksistensi dan kesinambungan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Bilamana sikap dan tindakan generasi sebelumnya dipinjam-pakai dan diterapkan begitu saja tanpa perubahan, maka niscaya dekadensi akan terjadi. Oleh karena itu, “revolusi” pola pikir adalah selalu relevan dan kontekstual sepanjang masa!

Saudara-saudara yang terpelajar! Pola pikir apakah yang seyogyanya kita miliki sebagai generasi yang hidup di Zaman Globalisasi? Saya berpendapat pola pikir generasi ini harus tetap berpijak atau berporos pada nasionalisme atau kepentingan Bangsa Indonesia. Tetapi di manakah bedanya dengan pola pikir, misalnya di Zaman Atom? Baik untuk kita perhatikan perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia internasional.

* * *

Dalam sejarahnya, bangsa-bangsa yang tinggal atau berdiam di Nusantara merupakan bangsa pelaut, bangsa agraris, dan bangsa pedagang. Dokumentasi sejarah mencatat hal yang pertama-tama membuat Nusantara menarik bagi perdagangan internasional adalah rempah-rempah. Meski bagi mereka yang tinggal di Nusantara, rempah-rempah merupakan komoditi biasa, tetapi bagi penduduk Eropa, rempah-rempah adalah komoditi yang “luar biasa” dan eksotik. Inilah yang terjadi pada sejarah umat manusia di abad XIV. Bangsa Spanyol dan Portugis kemudian bersaing untuk menjelajahi “*the uncharted waters*” untuk mendapatkan komoditi ini. Rupa-rupaya persaingan di antara dua bangsa ini sudah tidak sehat, dan oleh karena itu perlu ditengahi. Paus Alexander VI mengeluarkan *papal bull*,⁶ *Inter Caetera*, yang membagi dunia sebelah Barat dan Selatan *Cape Verde Islands*, yang terletak di Samudera Atlantik sebelah Barat Benua Afrika, kepada Spanyol, dan sebelah Timur dan Utara kepada Portugal, pada tanggal 4 Mei 1493. Sejarah kemudian bercerita bahwa bangsa Portugis-lah yang lebih beruntung untuk mendapatkan akses dan berdagang rempah-rempah dengan bangsa-bangsa yang tinggal di Nusantara. Demikianlah kota Lisbon berkembang menjadi kota dan pelabuhan yang penting untuk perdagangan rempah-rempah di Eropa.

Mangkatnya Raja Sebastiõ, raja Portugal, tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, menjadikan Raja Spanyol ketika itu, Phillip II, sebagai Raja Spanyol dan Portugal pada tahun 1580. Phillip II dan Sebastiõ adalah sesama cucu dari Raja Portugal sebelumnya, Manuel I. Demikianlah dua kerajaan tersebut menjadi satu, dan Lisbon menjadi bagian dari Kerajaan Spanyol. Beberapa tahun sebelum itu Daratan Rendah (*the Low Countries*) yang semula dikuasai oleh Spanyol memberontak, dan berperang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Bangsa-bangsa yang tinggal di daerah ini adalah yang kita kenal kemudian sebagai Bangsa Belanda. Akibat dari pemberontakan ini, bergulirlah perang panjang yang menguncang Eropa dan kemudian menentukan sejarah kehidupan umat manusia. Perang ini dikenal sebagai *the Eighty Years’ War* (1568-1648). Sebagai salah satu musuh Spanyol, maka tidaklah heran jika orang-orang Belanda tidak diperbolehkan berlabuh dan berdagang di Lisbon. Akibatnya Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah, dan harus mencari sendiri sumber rempah-rempah yang mereka butuhkan. Inilah latar belakang dari dikirimnya ekspedisi Cornelis de Houtman pada tahun 1596

⁶ “*Bull*” dalam Hukum Kanonik adalah instrumen atau dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Paus di Roma yang memuat suatu dekrit, perintah atau menetapkan apa yang merupakan hukum.

oleh sekelompok pedagang di Amsterdam. Singkat cerita, ekspedisi ini dinilai berhasil dan dikirimlah sejumlah ekspedisi lain. Rupa-rupanya persaingan di antara para pedagang ini sudah demikian tidak sehat, bahkan lebih tidak sehat dibanding dengan persaingan pedagang Belanda dengan pedagang-pedagang Spanyol dan Portugis, sehingga Van Oldenbarneveldt, negarawan Belanda terkemuka saat itu, kemudian membujuk para pedagang untuk bergabung dan mendirikan suatu perserikatan, yang akan menerima hak dagang eksklusif (*octrooi*) dari *Staten Generaal*. Demikian *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (Perserikatan Kompeni Hindia Timur) atau VOC yang terkenal itu berdiri pada 20 Maret 1602.

VOC didirikan berdasarkan suatu *Charter* dari *Staten Generaal*. Piagam tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara perusahaan-perusahaan dagang yang bergabung di dalamnya, tetapi juga menyatakan hak-hak apa saja yang diberikan kepada VOC. Piagam tersebut juga menyatakan bahwa tiada seorang pun, kecuali anggota VOC, selama 21 tahun boleh berlayar dari Belanda ke sebelah Timur dari Tanjung Harapan atau melalui Selat Magelan tanpa dikenai sanksi berupa penyitaan kapal dan barang-barangnya. Pada tanggal 27 November 1609, saat pengangkatan Pieter Both sebagai Wali Negeri (*Gouverneur-Generaal*) yang pertama serta pembentukan Dewan Hindia (*Raad van Indië*), diberikan perintah pada Pemerintah Tinggi Hindia (*Hooge Regering van Indië*), yang adalah VOC itu sendiri, supaya badan ini menjadi hakim dalam hal perdata maupun dalam hal pidana.

Keberadaan VOC di Nusantara pertama-tama adalah untuk berdagang. Bahwa kemudian VOC terlibat konflik dengan bangsa-bangsa di Nusantara atau terlibat dalam konflik antarbangsa di Nusantara, adalah konsekuensi dari tujuannya mengamankan perdagangan rempah-rempah. Pada puncak keberadaannya di Nusantara, VOC berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan menghukum setiap pihak yang melanggar “hak” monopoli tersebut. Akibat monopoli tersebut, VOC dapat menetapkan harga rempah-rempah sesuka hatinya, dan membuat bangsa-bangsa Eropa lainnya, terutama Inggris, meringgis. Keadaan ini mendorong Inggris untuk membudidayakan pohon cengkeh dan pala di India. Dan, berhasil! Demikianlah VOC tidak lagi mempunyai posisi monopolistik untuk perdagangan rempah-rempah dengan Benua Eropa, dan dibarengi dengan sejumlah skandal keuangan VOC mengalami kemerosotan yang dahsyat. Pada akhirnya VOC dinasionalisasi pada tanggal 1 Maret 1796, dan kemudian dibubarkan pada 31 Desember 1800. Semua aset, utang dan benteng VOC diambil-alih oleh Pemerintah Belanda.

Ketika perdagangan rempah-rempah tidak lagi mendatangkan keuntungan seperti sediakala, Belanda harus mengubah strateginya di Nusantara. Hal ini dilakukan dengan membuka Nusantara menjadi daerah perkebunan. Harapannya adalah sektor perkebunan akan mendatangkan pemasukan bagi kas negara (Belanda), seperti yang dulu diperoleh dari perdagangan rempah-rempah. Demikianlah abad XIX menjadikan Nusantara sebagai penghasil komoditi yang laku di dunia internasional, seperti kopi, tembakau, teh, karet, dan kelapa sawit. Pembukaan lahan untuk perkebunan menuntut Belanda mengubah kebijakan di Nusantara. Dari berkonsentrasi pada wilayah pesisir, menjadi penetratif ke wilayah pedalaman. Kebijakan ini mendatangkan konflik berkelanjutan dengan bangsa-bangsa di Nusantara. Cerita selanjutnya sudah menjadi pengetahuan umum bagi saudara-saudara.

Pada pertengahan abad XIX ini, di Oil Creek, Negara Bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, ditemukan minyak bumi sebagai sumber energi. Jika pada abad XVII dan XVIII VOC menjadi perusahaan multinasional terkemuka di dunia, maka pada abad XIX giliran Standard Oil Company, dengan John D. Rockefeller sebagai aktor utamanya, menjadi perusahaan multinasional terkemuka di dunia. Keluarga Nobel, yang setiap tahun memberikan penghargaan yang bergengsi itu, juga mendapatkan kekayaan utamanya dari bisnis minyak bumi ini. Emas hitam, demikian disebut orang, mendatangkan keuntungan yang luar biasa!

Ternyata cadangan minyak bumi juga dimiliki bumi Nusantara. Bangsa Melayu di Sumatera Timur, jauh sebelum nilai ekonomis minyak bumi disadari, telah menggunakan minyak bumi untuk penerangan. Aeilko Jans Zijlker, seorang manajer pada *East Sumatra Tobacco Plantation*, pada bulan Februari 1880 secara kebetulan “menemukan” minyak bumi dari bau obor

yang memberikan penerangan di saat hujan deras. Kemudian ia meminta konsesi dari Sultan Langkat atas suatu wilayah, yang kemudian dikenal sebagai Telaga Said. Lima tahun kemudian pengeboran minyak bumi mendatangkan hasil yang menggembirakan secara produksi. Tetapi Zijlker kekurangan dana, dan untuk mengatasinya ia meminta bantuan investasi. Kebutuhan Zijlker akan dana mendapatkan sambutan yang positif dari mantan Gubernur Bank Sentral Hindia Belanda dan juga mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bahkan Raja Belanda, William III, sendiri kemudian memberikan nama “Royal” bagi perusahaan yang dibentuk oleh Zijlker untuk pengeboran minyaknya. Demikianlah berdiri *Royal Dutch Company*. Perusahaan ini kemudian pada tahun 1907 bergabung dengan *Shell Trading and Transport* dari Inggris, menjadi *Royal Dutch Shell*. Hari ini kita melihat SPBU-nya mulai marak di Jabodetabek. Sampai dengan awal abad XX, bumi Nusantara adalah satu-satunya daerah penghasil minyak bumi di belahan Asia Tenggara dan Timur. Abad ini juga merupakan abad bangkitnya nasionalisme di belahan Asia, dan kemudian Afrika.

* * *

Sekarang saya meminta perhatian saudara-saudara sejenak untuk Jepang. Jepang, yang telah dibukakan matanya tentang kemajuan Barat lewat kedatangan Komodor Matt Perry pada tahun 1852, di awal abad XX mulai mencari-cari posisi dalam konstelasi politik internasional. Pasca Restorasi Meiji – yang artinya adalah Aturan Pencerahan – Jepang menyakini bahwa mereka mengemban tugas mulia untuk “mencerahkan” bangsa-bangsa lain di Asia. Manchuria – yang oleh Jepang disebut Manchukuo – dan Pulau Formosa (Taiwan sekarang) kemudian mereka duduki. Untuk yang pertama, Jepang punya rencana besar untuk membanggunya dan secara ekonomi berkepentingan untuk menguasai dan mempertahankan Manchuria. Tetapi rencana-rencana Jepang tersebut gagal, dan pendudukan Jepang tersebut menimbulkan sengketa dengan kaum Nasionalis Cina yang dipimpin oleh Sun Yat Sen. Cina berpendapat Manchuria adalah bagian dari wilayahnya, sedangkan Jepang berpendapat Manchuria yang tidak stabil apalagi aman adalah wilayah tidak bertuan. Oleh karena itu, Jepang merasa memiliki hak yang sah untuk menduduki Manchuria. Dua bangsa ini rupa-rupanya tidak mengacuhkan keberadaan bangsa Manchu, yang meski secara fisik tidak terlalu berbeda dengan bangsa Cina adalah suatu bangsa tersendiri. Tidaklah mengherankan jika kemudian Cina dan Jepang terlibat dalam konflik bersenjata. Hal ini penting bagi pertemuan kita hari ini, karena konflik bersenjata ini merupakan titik awal dari pendudukan Jepang di Indonesia. Sengketa terkait Manchuria membuat Amerika Serikat, yang terikat perjanjian dengan Cina Nasionalis, terpaksa menghentikan pasokan, antara lain, minyak bumi ke Jepang. Pasokan hanya akan dilanjutkan jika Jepang angkat kaki dari Manchuria. Persyaratan tersebut bagi Jepang semakin mensahkan “kesewenang-wenangan” Barat di Asia. Untuk mencapai tujuannya, Jepang harus mendapatkan minyak bumi yang bebas dari intervensi Amerika Serikat dan sekutunya – Inggris dan Belanda. Jepang kemudian menengok ke Selatan (baca: Hindia Belanda), dan keputusan untuk menduduki Hindia Belanda diambil. Penyerangan terhadap Pangkalan Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor adalah untuk mengamankan invasi ke Asia Tenggara. Pendudukan Filipina adalah sangat strategis secara militer, karena siapa yang menguasai Filipina ia adalah penguasa Samudra Pasifik. Pendudukan Singapura berarti pemotongan jalur laut Inggris ke Asia Tenggara dan Timur. Demikianlah langkah-langkah yang ditempuh untuk menguasai Indonesia.

* * *

Sekarang ada perlunya kita memperhatikan dinamika yang terjadi di Timur Tengah. Sedikit banyak nasionalisme bagi orang Arab adalah mirip dengan nasionalisme yang didasarkan pada kesamaan nenek moyang seperti yang berkembang di kalangan bangsa Cina dan Yahudi. Tetapi nasionalisme Arab memiliki keunikannya sendiri. Orang Arab menyebut nasionalisme

dengan istilah *al-qawmiyya* atau Pan-Arab. Di sisi lain, orang Arab juga mengenal *al-wataniyya*, yakni keterikatan atau perasaan yang dimiliki terhadap negara-negara Arab asalnya masing-masing. Akar dari keunikan “nasionalisme” Arab ini dapat ditarik ke cara pandang orang Arab-Islam, yakni membedakan dunia menjadi *dar-al-Islam* dan *dar-al-harb*. Yang disebut pertama adalah wilayah damai, dan yang terakhir adalah wilayah yang senantiasa dalam situasi konflik. Penyebaran agama Islam, dan penggunaan bahasa Arab – yang notabene adalah bahasa yang dipakai dalam Al-Quran – memperluas perasaan ke-Arab-an dan basis nasionalisme Arab.

Oleh karena itu, maka tidaklah heran jika nasionalisme seperti yang dikenal di dunia Barat merupakan sesuatu yang asing bagi dunia Arab. Ini sama sekali tidak untuk mengatakan bahwa bangsa Arab tidak mengenal nasionalisme dalam konsep negara-bangsa. Demikianlah selama berabad-abad sampai dengan awal abad XX bangsa Arab bisa menerima pemerintahan Kekaisaran Ottoman, yang secara etnis bukan Arab. Kesamaan iman merupakan faktor utama dan penting bagi penerimaan suatu kekaisaran Turki oleh bangsa Arab. Bangkitnya nasionalisme Arab justru diakibatkan oleh suatu usaha yang dilakukan oleh Komite untuk Persatuan dan Kemajuan (*the Committee for Union and Progress/CUP*) – yang dikenal oleh dunia Barat sebagai *the Young Turks* – untuk mempromosikan reformasi politik di Turki dengan mengadopsi gaya Barat yang sekuler. Gerakan CUP merupakan gerakan untuk orang Turki, dan bukan gerakan untuk seluruh warga Kekaisaran Ottoman yang multi-etnis. Reaksi bangsa Arab atas dinamika ini adalah munculnya Hussein Ibn Ali, penguasa-vassal di Hejaz,⁷ sebagai tokoh Arab penentang dinamika tersebut. Hussein bergelar *sharif*, yang menandakan bahwa ia adalah keturunan Nabi Muhammad dari garis putrinya Fatima, dan keluarganya Suku Hashemit telah memerintah Arabia selama satu milenium, dan keturunannya sekarang bertahta di Jordania. Hussein berambisi untuk memperluas kekuasaannya di Hejaz hingga mencakup seluruh Jazirah Arabia. Bahkan ia bercita-cita membentuk suatu negara Arab yang merdeka dari Turki.

Pergulatan antara Hussein dengan Kaisar Ottoman, Hussein dengan suku-suku nomaden di Jazirah Arab, resepsi sekulerisme oleh kaum muda Turki, dan kepentingan negara-negara Barat menghasilkan Timur Tengah yang kita kenal sekarang. Pada dekade 50an dan 60an, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, mengusung “Nasionalisme Arab” untuk menyatukan semua orang Arab ke dalam suatu negara-bangsa (*nation-state*). Tetapi gaya nasionalisme ini, meski sempat menyatukan Mesir dan Syria sebagai suatu negara-bangsa, lebih dinilai oleh kebanyakan orang sebagai ambisi pribadi Nasser.

Bilamana perkembangan di Timur Tengah pada awal abad XX kita kaitkan dengan Indonesia, maka kita bisa melihat dampak dan korelasi yang menarik. Meskipun bangsa-bangsa di Nusantara telah mengenal Islam paling tidak semenjak abad XIII, orang-orang Arab baru secara massal masuk ke Nusantara pada abad XVIII. Mereka umumnya datang dari Hadramaut, kawasan bagian Selatan Jazirah Arab yang ketika itu merupakan suatu Protektorat Inggris. Motivasi mereka datang ke Nusantara adalah untuk berdakwah. Baru setelah itu mereka berdagang. Barang-barang dagangan mereka awalnya berfokus pada tujuan dakwah, yakni buku-buku agama, sajadah, dan tasbih. Meski mereka juga berdagang kain cita India, baik dan sarung. Orang-orang Arab di Indonesia memiliki stratifikasi sosial yang unik. Tercatat paling tidak ada lima golongan – Golongan Saada, Golongan Qabaail, Golongan Masyaayikh, Golongan Da’fa, dan Golongan ‘Abiid. Belakangan golongan-golongan ini mengerucut menjadi dua golongan besar – Golongan Sayid dan Non-Sayid. Polarisasi ini terutama disebabkan oleh perbedaan paham mengenai kafa’ah nikah dan tradisi-tradisi lainnya yang dipandang menyimpang dari agama Islam. Orientasi politik orang-orang Arab di Indonesia pada awal XX ada dua: *berorientasi ke Arab (Pan-Arab)* dan *berorientasi ke Indonesia*. Orientasi pertama adalah sejalan dengan pergolakan yang terjadi di Jazirah Arab. Orientasi kedua berkembang setelah terjadi kawin-mawin dengan orang-orang Indonesia dan tumbuhnya ikatan emosional dengan Indonesia.

⁷ Hejaz adalah suatu provinsi dalam Kekaisaran Ottoman yang meliputi bagian Barat Jazirah Arabia.

* * *

Terakhir saya meminta Anda untuk memperhatikan perkembangan yang terjadi di Cina dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Cina sebagaimana Anda ketahui adalah suatu bangsa yang besar dan negara yang pada dasarnya punya akar historis yang kuat. Tetapi penduduk Cina demikian banyaknya, bukan hanya sekarang ini tetapi juga semenjak dulu. Oleh karena itu, tidaklah heran kemiskinan – yang antara lain disebabkan oleh alasan klasik, yakni tata pemerintahan yang buruk – merajalela. Untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, maka banyak orang Cina yang beremigrasi ke seluruh penjuru dunia. Orang Cina, misalnya, terlebih dahulu “menemukan” Benua Amerika di tahun 1421 menurut Gavin Menzies dalam bukunya “1421: The Year China Discovered America”, sebelum Columbus menemukannya di tahun 1492.

Salah satu tujuan utama emigrasi adalah bumi Nusantara. Orang-orang Cina pertama yang tinggal di Pulau Jawa bermukim di Banten, yang adalah pelabuhan utama di Nusantara pada abad XVI. Mereka umumnya adalah pedagang. Ketika Jan Pieterzoon Coen berhasil merebut Jayakarta dan membangunnya menjadi Batavia, mereka dibujuk untuk pindah dari Banten. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendatangkan atau membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang Cina ke Hindia Belanda untuk menjadi kuli di pertambangan-pertambangan yang diusahakan oleh orang-orang Belanda atau Eropa.

Orang-orang Cina yang datang ke Nusantara di puncak masa keemasan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, yakni di era Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*), umumnya berasal dari Provinsi Fukien, dengan Amoy sebagai pelabuhan emigrasinya. Mereka umumnya adalah kaum pedagang, dan memiliki pengetahuan yang baik tentang kebudayaan Cina. Imigran Cina pada akhir abad XIX dan awal XX adalah golongan yang berbeda. Mereka umumnya buta huruf dan meski berpegang teguh pada adat-istiadat hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang budaya Cina. Mereka tidak tertarik dengan urusan Indonesia, dan selalu berorientasi ke Cina Daratan.

Kebijakan Dinasti Manchu selama berabad-abad adalah melarang emigrasi, dan menganggap semua orang Cina di luar imperiumnya telah kehilangan kebangsaan mereka. Lebih lagi ditetapkan larangan bagi para emigran untuk kembali ke Cina. Tetapi kebijakan yang ditetapkan pada tahun 1896 berbeda seratus delapan puluh derajat. Kekaisaran Manchu mengeluarkan suatu peraturan yang justru menetapkan bahwa semua orang berdarah Cina, dari pihak ayah, tetap menjadi warga negara Cina. Kebijakan ini kemudian diteruskan oleh Cina Nasionalis – setelah runtuhnya Dinasti Manchu – dengan mengeluarkan UU Kewarganegaraan Cina tahun 1929 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan dari orangtua Cina, di mana pun mereka berada dan berapa lama pun mereka sudah melawat ke luar Cina, tetap menjadi warganegara Cina!

Kebijakan tersebut memiliki dampak langsung kepada Hindia Belanda, dan dampak tersebut tidak kecil. Penduduk Hindia Belanda keturunan Cina pada awal abad XX berkisar 2 juta orang. Akibat perundangan kewarganegaraan yang dikeluarkan tersebut, maka mereka semua mereka menjadi warga negara Cina. Bilamana fakta ini kita kaitkan dengan keragaman para imigran dari Cina, maka kita akan mendapatkan suatu fenomena yang menarik.

Orang-orang Cina yang berasal dari kaum pedagang adalah mereka yang beruntung dari segi finansial dan pendidikan. Mereka adalah golongan menengah dan mendapatkan pendidikan sampai di Belanda. Kembali ke Hindia Belanda, mereka menjadi lebih dekat dan nyaman ketimbang dengan orang-orang Cina lainnya dan penduduk Indonesia lainnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila mereka memiliki *orientasi ke Belanda* atau membela kepentingan Belanda. Sebagian terbesar penduduk berdarah Cina pada awal abad XX tidak mendapatkan privilese yang pernah dinikmati di era Tanam Paksa. Di sisi lain, orang-orang Jepang yang tinggal di Hindia Belanda semenjak tahun 1899 digolongkan ke dalam Golongan Eropa.⁸ Penyetaraan ini

⁸ Pemerintah Kolonial Belanda menjalankan politik diskriminasi terhadap penduduknya dengan menggolongkan mereka ke dalam tiga golongan penduduk (*bevolkingsgroepen*) berdasarkan kategori

adalah bentuk pengakuan Belanda – dan bangsa-bangsa Barat lain pada umumnya – atas kemajuan luar biasa yang dicapai oleh Jepang pasca Restorasi Meiji. Hal ini mendatangkan kecemburuan yang luar biasa bagi orang-orang Cina yang merasa telah berjasa bagi Belanda, tetapi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dibandingkan dengan yang diterima oleh orang-orang Jepang, yang notabene belum memiliki kontribusi apa-apa bagi Belanda. Mereka ini menyambut baik UU Kewarganegaraan Cina, dan ingin meminta bantuan Pemerintah Cina untuk perbaikan nasib mereka. Demikianlah kita saksikan *orientasi ke Cina* dari orang-orang Cina di Hindia Belanda. Terakhir adalah orang-orang Cina yang *berorientasi pada Indonesia* dan bersimpati dengan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah golongan minoritas.

Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa paling tidak ada dua semangat nasionalisme yang berkembang di kalangan orang-orang Cina penduduk Hindia Belanda, yakni Nasionalisme Cina dan Nasionalisme Indonesia.

* * *

Sekarang mari kita kembali ke dalam negeri. Menurut hemat saya, akar utama dari kemerdekaan Indonesia bukan pada perang antara Belanda dengan penduduk Nusantara, seperti misalnya dalam kasus Perang Diponegoro, melainkan dari mulai dijalankannya Politik Etis (*Etische Politiek*) di Hindia Belanda. Politik Etis dipelopori oleh Pieter Brooschooft (wartawan *De Locomotief*, koran yang terbit di Semarang) dan Conrad Theodor van Deventer (seorang politikus) sebagai suatu reaksi atas kebijakan Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) yang dijalankan di Hindia Belanda semenjak tahun 1830. Van Deventer menulis suatu artikel yang berjudul “*Een Eereschuld*” (Utang Budi) pada tahun 1899 di majalah *De Gids*. Van Deventer berpendapat bahwa Bangsa Belanda yang setelah sekian lama menikmati keuntungan dari bumi Nusantara memiliki kewajiban moral untuk memajukan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 menggariskan kebijakan *Trias Politika* untuk Hindia Belanda, yakni Irigasi, Emigrasi dan Edukasi. Maka mulailah pendidikan ala Barat diterapkan di Hindia Belanda secara lebih baik, meski masih diberikan secara terbatas dan elitis. Tetapi hendaknya tujuan dari Politik Etis, yakni mendidik bangsa-bangsa Bumiputera, juga ditinjau dari sudut ekonomi. Seperti sudah saya singgung sebelumnya, Nusantara kemudian menjadi daerah perkebunan. Akibat ekonomi dari ini antara lain adalah lahirnya golongan menengah dan dibutuhkannya tenaga kerja yang memiliki kecakapan atau keahlian khusus. Dari perspektif ini, maka dapatlah dimengerti mengapa yang dibuka pertama kali adalah sekolah asisten dokter tambahan (1859) – yang kemudian ditingkatkan menjadi *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (Sekolah Kedokteran Jawa) atau STOVIA (1898), yang kemudian menjadi *Geneeskundige Hogeschool* (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran (1927), yang adalah cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; disusul *Rechtsschool* (Sekolah Hukum) di Batavia pada tahun 1909 untuk mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan Kabupaten – yang kemudian menjadi *Recht Hooge School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum pada tahun 1924, yang adalah cikal-bakal dari *Faculteit de Rechtsgeleerdheid* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia); dan *Technische Hooge School* (THS) atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Kesempatan bersekolah yang masih sangat terbatas dan elitis membangkitkan kesadaran di kalangan terpelajar pribumi untuk turut-aktif menyelenggarakan pendidikan ala Barat. Inilah yang mendorong dr Wahidin Sudiro Husodo pada tahun 1906 berkeliling Pulau Jawa untuk memperjuangkan beasiswa bagi putra-putra Jawa. Usaha ini disambut hangat oleh mahasiswa Raden Sutomo, Gunarwan, dan Suraja. Berdirilah Boedi Oetomo, yang tahun ini kita peringati sebagai 100 tahun Kebangkitan Nasional.

rasial. Golongan penduduk teratas adalah Golongan Eropa (*Europeanen*), diikuti Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) – yang kemudian dipecah menjadi Tionghoa dan Non-Tionghoa – dan Golongan Bumiputra (*Inlanders*) di bagian terbawah dari piramida penduduk ini. Hukum Belanda berlaku bagi golongan pertama dan kedua, dan hukum adat bagi golongan terakhir.

Pada hakikatnya, Kebangkitan Nasional adalah suatu revolusi! Revolusi pola pikir. Seperti umumnya terjadi di belahan dunia manapun, revolusi dilakukan oleh kaum muda terpelajar! Itulah sebabnya saya menggarisbawahi kata “mahasiswa” di atas. Kebangkitan tidak bisa ditentukan waktunya, apalagi digadang-gadangkan dengan menyelenggarakan kemewahan seperti yang dilakukan dalam peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional Stadion Utama Bung Karno bulan Mei kemarin. Tidak bisa!

Kaum intelektuallah yang dapat memulai suatu perubahan dalam tatanan dan pola pemikiran masyarakatnya. Tetapi tidak semua orang terpelajar dapat menjalankan fungsi intelektual di dalam masyarakat. Antonio Gramsci, seorang Marxis dari Italia, menulis dalam *Prison Notebooks* bahwa “*all men are intellectuals, one could therefore say: but not all men have in society the function of intellectuals.*” Untuk itu perlu ada kesadaran, bukan hanya dalam kategori pemikiran, tetapi juga dalam kategori kemasyarakatan. Jika nasionalisme hanya dilihat dari sisi internal semata, maka kita akan mendapatkan dan mempraktekkan nasionalisme yang sempit. Semata-mata *chauvinism* atau *jingoism*. Ini akan memudahkan kita untuk terjebak pada pemikiran dan gerakan kanan, bahkan ultrakanan. Tetapi di sisi lain, persepsi akan nasionalisme yang sempit juga mungkin membawa kita untuk berpikir sebaliknya, kiri dan bahkan sangat kiri. Karena yang hendak diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, yang notabene masih tidak juga beranjak dari kemiskinan! Sikap ini akan membawa kita untuk berpikir melulu pada apa yang menjadi kepentingan bangsa. Maka ini cocok dengan makna kedua dari *Nationalism* di atas, yakni *the doctrine that national interests, security, etc are more important than international considerations; opposed to internationalism.*

Tetapi dalam konteks masa kehidupan kita sekarang, satu hal yang tidak bisa dielakkan. Globalisasi. Dunia sudah menjadi desa-global (*global village*), dan interdependensi antara negara yang satu dengan negara yang lain yang ada sekarang merupakan suatu fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia sebelumnya. Dari pemaparan di atas, kita bisa lihat bahwa dinamika yang terjadi di Indonesia tidak bisa tidak dicermati secara interdependen. Benar bahwa terjadi dinamika sendiri secara nasional, tetapi dinamika yang terjadi di luar Indonesia juga mendatangkan dampak langsung dan signifikan terhadap dinamika di Indonesia sendiri. Di sisi lain bumi Indonesia, yang demikian dikarunia oleh kekayaan alam yang luar biasa, selalu menjadi capaian yang menggiurkan bagi bangsa-bangsa asing. Ditambah lagi, letak geografis Indonesia adalah mutlak strategis! Maka secara geopolitik Indonesia selalu akan menjadi negara dan bangsa yang penting. Tetapi “penting” tersebut bisa bermakna ganda. Bisa penting untuk menjadi negara dan bangsa yang stabil dan kuat; tetapi juga bisa bermakna penting untuk menjadi negara yang tidak kuat dan labil. Tanpa bermaksud untuk menjadi *overconfident* dengan fakta alamiah yang kita miliki, Indonesia yang kuat adalah ancaman bagi banyak pihak.

Di dunia ini, selain Indonesia, ada dua negara yang dikarunia kekayaan alam yang luar biasa – Amerika Serikat dan Rusia. Bila keduanya kuat dan stabil, maka dunia pernah berada di dalam kecekaman Perang Dingin. Indonesia yang baru merdeka di abad XX menjadi “rebutan” bagi Amerika Serikat dan Rusia (baca: Uni Soviet). Masing-masing berusaha memasukkan Indonesia ke dalam *sphere of influence*-nya. Dan secara konsisten Indonesia selalu berada di titik-mencari-keseimbangan, meski pada akhirnya condong pada “penaklukan-diri” ke arah Barat.

Demikian pengantar saya untuk diskusi kita hari ini. Saya berharap saudara-saudara bisa dengan secara terpelajar sekarang melihat bahwa nasionalisme kita tidak bisa berdiri-sendiri terlepas dari pergolakan di dunia internasional. Selanjutnya saya menantikan diskusi yang dapat mengasah kesadaran kita lebih lanjut akan nasionalisme, yang memang harus kita miliki dengan keseharian kita, dan tantangan zaman. Terima kasih!

Daftar Bacaan:

- Ayto, John. *Dictionary of Word Origins*. New York: Arcade Publishing, 1993.
- Ball, John. *Indonesian Legal History 1602 – 1848*. Sydney: Oughtershaw Press, 1982.
- Bernard H. M. Vlekke. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Diterjemahkan oleh Samsudin Berlian. Jakarta: KPG, Freedom Institute dan Balai Pustaka, 2008.
- Buruma, Ian. *Inventing Japan 1853-1964*. New York: Modern Library, 2003.
- Chomsky, Noam. *Hegemony or Survival – America’s Quest for Global Dominance*. New York: Owl Books, 2003.
- Fasseur, C. *Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the Struggle Between Adat Law and Western Law in Indonesia*, dalam W. J. Mommsen dan J. A. de Moor, *European Expansion and Law – The Encounter and Indigenous Law in 19th- and 20th-Century Africa and Asia*, Oxford/New York: Berg, 1992.
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption – Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. London: Profile Books, 1999.
- Giddens, Anthony. *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books, 2002.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Orders*. New York: Touchstone Book, 1997.
- Gautama, Sudargo. *Warga Negara dan Orang Asing*, Bandung: Alumni, 1997.
- Muaja, A. J. *The Chinese Problem in Indonesia*. Djakarta: New Nusantara Publishing Coy, s.a.
- Lamb, David. *The Arabs: Journeys beyond the Mirage*. New York: Vintage Books, 2002.
- Latuihamallo, P.D. dkk. *Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab: Mengenang Dr. J. Leimena*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980.
- Lohanda, Mona. *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Depok: Masup Jakarta, 2007.
- Renan, Ernest. *Apakah Bangsa Itu? (Qu’est ve qu’un nation?)*. Dialih-bahasakan oleh Prof. Mr. Sunario. Bandung: Alumni, 1994.
- Rugman, Alan M. dan Joseph R. D’Cruz. *Multinationals as Flagship Firms: Regional Business Networks*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Said, Edward. *Representative of the Intellectual*. New York: Vintage Books, 1996.
- Santoso, Budi. *Peranakan Keturunan Arab dalam Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: Progress, 2003.
- Supomo, R. *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid I: Dari Zaman Kompeni sehingga Tahun 1848*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Suryadinata, Leo. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- _____ (ed.). *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*. Singapore: Singapore University Press, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Viorst, Milton. *Storm from the East*. New York: Modern Library, 2006.
- Wardaya, Baskara T., SJ. *Indonesia melawan Amerika: Konflik Perang Dingin, 1953-1963*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Webster’s New Twentieth Century Dictionary*, Second Edition.
- Yergin, Daniel. *The Prize: Epic Quest for Oil, Money and Power*, London: Pocket Books, 1991.
- Yergin, Daniel dan Joseph Stanislaw. *The Commanding Heights – the Battle for the World Economy*. New York: Touchstone Book, 2002.